



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu. Telp : (0451) 456885, 411289, 428503

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Renja (Rencana Kerja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2024. Renja 2024 ini mengacu pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun.

Renja Tahun 2024 disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan industri dan perdagangan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Renja Tahun 2024 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja, Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategi beserta program dan kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan, sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan.

Renja Tahun 2024 diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terlaksana dengan baik, sesuai harapan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Demikian Renja ini disusun, diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan untuk rencana tindak kegiatan bagi seluruh aparatur OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu,

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Sulawesi Tengah,



Renja 2024 Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.1.1 Pelaksanaan APBD TA 2022	7
2.1.2 Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra	8
2.1.3 Realisasi Program yang tidak Memenuhi Target....	43
2.1.4 Realisasi Program yang Memenuhi Target	43
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	44
2.2.1 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan.....	44
2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian.....	45
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	47
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan SKPD	47
2.3.1.1 Bidang Industri.....	47
2.3.1.2 Bidang Perdagangan.....	48
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi SKPD	50
2.3.2.1 Permasalahan Urusan Perdagangan.....	50
2.3.2.2 Permasalahan Urusan Perindustrian	51
2.3.3 Tantangan dan Potensi.....	52
2.3.3.1 Tantangan dan Potensi Urusan Perdagangan.....	52
2.3.3.2 Tantangan dan Potensi Urusan Perindustrian.....	52
2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.....	52
2.3.4.1 Rekomendasi dan Catatan Strategis Urusan Perdagangan.....	52
2.3.4.2 Rekomendasi dan Catatan strategis Urusan Perindustrian.....	54
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	56

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	127
3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian	127
3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan	127
3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tahun 2024.....	128
3.3 Program dan Kegiatan	133
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2024	
4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	142
BAB V PENUTUP	
5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian	144
5.3 Kaidah-kaidah pelaksanaan	144
5.4 Rencana tindak lanjut	144

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Perbandingan realisasi anggaran tahun 2020 - 2022	7
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022	9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Program yang tidak memenuhi target Indikator Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 2.4 Rekapitulasi Program yang memenuhi target Indikator Kinerja Tahun 2022	43
Tabel 2.5 Neraca Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022	45
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2022	46
Tabel 2.7 Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024	56
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	129
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	131
Tabel 3.3 Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	133
Tabel 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024	137
Tabel 4.1 Usulan Program/Kegiatan Kabupaten / Kota Tahun 2024	143

DAFTAR GAMBAR

		<i>Halaman</i>
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi	3

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Renja SKPD penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tiap SKPD berkewajiban menyusun Renja sebagai satu kesatuan sistem perencanaan nasional, yang berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), serta menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun berjalan.

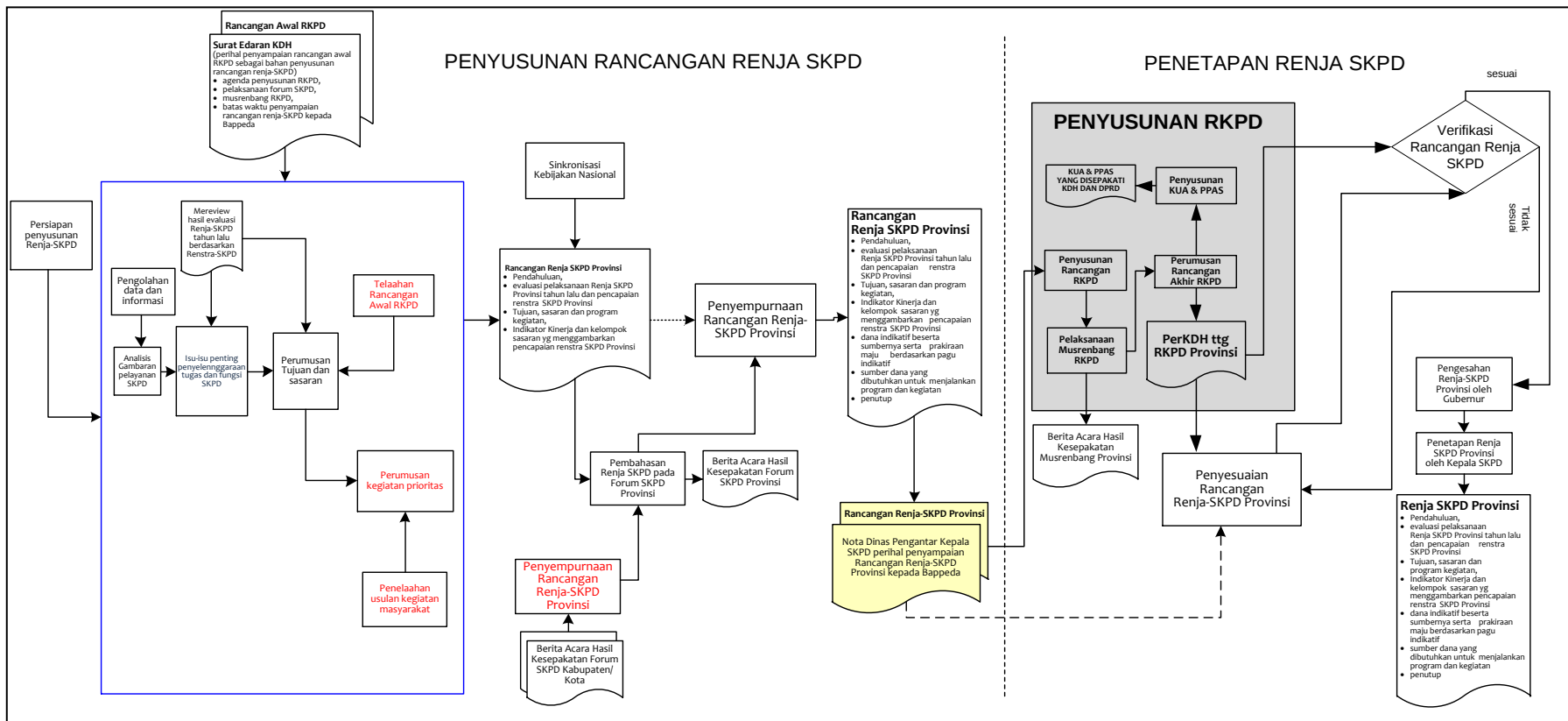
Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terkecil. Renja

SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangat menentukan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Sulawesi Tengah Tahun 2024 diperlukan keselarasan dan kesinambungan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dimana secara teknis pelaksanaannya didelegasikan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) melalui dokumen Rencana Kerja.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang perindustrian dan perdagangan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Renja SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024. dan penerjemahan visi, misi, program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Tahun 2021-2026. Disamping itu Renja SKPD Tahun 2024 ini dapat menggambarkan agenda ataupun rencana program, strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan sektor Industri dan Perdagangan. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi pada Tahun 2024. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi tersaji pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA SKPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah UU Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebagai :

1. Dokumen perencanaan OPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan untuk periode satu tahun bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sarana untuk melaksanakan keterpaduan pelaksanaan program dengan unit kerja lainnya melalui koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap program kegiatan dalam pencapaian target dan sasaran kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penyusunan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV . Telaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Bab V . P E N U T U P

- 4.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian
- 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 4.3. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.1.1. Pelaksanaan APBD TA 2022

Hasil pelaksanaan APBD pada Tahun 2022 dicapai berdasarkan 2 (dua) aspek yaitu anggaran dan kinerja. Pada aspek realisasi anggaran dapat dibagi menjadi APBD dan APBN. Realisasi APBD dibagi menjadi Belanja langsung dan Belanja tidak langsung

Belanja langsung 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 28.658.806.379 dengan realisasi Rp. . 27.243.917.500 (95,06%) dengan realisasi fisik sebesar 99%.

Belanja Tidak Langsung Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.270.535.253 dengan realisasi Rp.10.682.273.963 (94,78%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Belanja APBN Tahun 2022 dengan pagu anggaran sebesar Rp . 2.019.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.999.918.242 (99,03%) dengan realisasi fisik sebesar 100%.

Total keseluruhan pagu belanja Tahun 2022 sebesar Rp.41.948.946.632 dengan realisasi total sebesar Rp.37.926.191.463 (90,40%).

Perbandingan realisasi anggaran antara tahun 2020 - 2022 tersaji pada tabel 2.1 berikut :

Tabel. 2.1
Perbandingan Realisasi Anggaran
Tahun 2020 – 2022

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A.	APBD	28.133.965.103,48	30.054.871.223	37.926.191.463	
I.	BELANJA LANGSUNG	17.834.884.195,48	19.645.942.472	27.243.917.500	
II.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.299.080.908.00	10.408.928.751	10.682.273.963	
B.	APBN	2.666.959.700,00	2.084.108.000	1.999.918.242	

	JUMLAH		32.138.979.223	39.926.109.705	
	(A+ B)				

2.1.2 Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 tersaji pada tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tengah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3) 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target Program Dan Kegiatan (renja perangkat daerah Tahun n-1) 2023	Realisasi Program Dan Kegiatan (renja perangkat daerah Tahun n-1) 2023	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2022	Tingkat Realisasi			realisasi capaian program dan kegiatan s/d (tahun n-1) 2023	tingkat capaian target realisasi renstra %
1	2	3	4	5	6	7	$8=7/6 \times 100\%$	9	10	$11=(5+7+10)$	$12=11/4$
3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66		62	0	0	64			
3 3 0 0 1.0 1 1	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Disperindag	B		B	BB	#VALUE!	B			
3 3 0 0 1.0 0 1 1 1	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		1	1	100	1			
3 3 0 0 1.0 0 1 1 2	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1		1	1	100	1			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1		1	0	0	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90		90	95	105.625 5416	90			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	125		115	115	100	120			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		0	0	#DIV/0!	1			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500		500	500	100	500			
0	1	2	3													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12		12	12	100	12			
0	1	2	4													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15		15	15	100	15			
0	1	2	5													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5		5	5	100	5			
0	1	2	6													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14		14	14	100	14			
0	1	2	7													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1		1	1	100	1			
0	1	2	8													
3	3	0	1.0		Keg.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	14		14	14	100	14			
0	1	3														
0	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10		10	10	100	10			
0	0	1	3	2												

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2		2	2	100	2			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stokeholder)	A		B	B	#VALUE!	B			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1		1	0	#DIV/0!	2			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4		4	4	100	4			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18		18	10	83.33333333	16			
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	44		42	36	100	42			
3	3	0	1.0	0	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
0	1	7	2													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5		1	1	100	3			
0	1	7	5													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16		7	14	200	15			
0	1	7	6													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		0	0	#DIV/0!	2			
0	1	7	9													
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		1	2	200	2			
0	1	7	0													
3	3	0	1.0		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
0	1	8					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13		1	1	100	13			
0	1	8	1													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12	12	100	12			
0	1	8	2													

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4		4	4	100	4			
3	3	0	1.0	0	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
0	0	1	9				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		1	0	0	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35		35	35	100	35			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0	0	#DIV/0!				
0	0	1	9	5	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5		5	0	0	3			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110		117	117	100	115			
0	0	1	9	6												

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	1	100	1			
											0					
3	3	0			Prog.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C	100		100	100	100	100			
							Persentase penerbitan SKA	100		100	100	100	100			
3	3	0	1.0		Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB Bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0	0	#DIV/0!				

3	3	0	1.0		Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0		Keg.	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	Jumlah Dokumen Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	1		0	0	#DIV/0!	1			

3	3	0	1.0		Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA	1		1	0	0	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal	1		1	1	100	1			
3	3	0			Prog.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi	100		100	100	100	100			
3	3	0	1.0		Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	100		1	1	100	100			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	2		2	0	0	2			
3	3	0			Prog.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok	100		100	100	100.00	100			

3	3	0	1.0		Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4		4	4	100	4			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4		0	0	#DIV/0!	4			
3	3	0	1.0		Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	4		4	4	100	4			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6		6	6	100	6			
3	3	0	1.0	0	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	100		100	98	97.575	100			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	1		1	1	100	1			
3	3	0	0	5	Prog.	Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor	12,023		9,082.00	19,017	209.39	9,634.00			

3	3	0	1.0		Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	6		3	3	100	3			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	24		12	37	308.333 3333	24			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	2		2	2	100	2			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	10		10	60	600	10			
3	3	0			Prog.	Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi	20		20	20	100.25	20			
3	3	0	1.0		Keg.	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	1		0	0	#DIV/0!	1			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kebersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	3		0	0	#DIV/0!	3			
3	3	0	1.0		Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	25		25	0	0	25			
3	3	0	1.0		Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1		1	1	100	1			

3	3	0				Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100		100	391	391	100			
1	2																
3	3	0	1.0			Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1		1	1	100	1			
1	2	1															
3	3	0	1.0	0		Sub Keg.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1		0	0	#DIV/0!	1			
1	2	1		1													
3	3	0	1.0	0		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3		2	2	100	3			
1	2	1		2													
3	3	0	1.0	0		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2		2	2	100	2			
1	2	1		3													
3	3	0	1.0	0		Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1		1	1	100	1			
1	2	1		4													

3 1	3 2	0 1	1.0 1	0 5	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1		0	0	#DIV/0!	1			
3 1	3 2	0 1	1.0 1	0 6	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1		1	1	100	1			
3 1	3 3	0 3			Prog. Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis	100		100	100	100	100			
3 1	3 3	0 1	1.0 1		Keg. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	1		1	1	100	1			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKIKewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasisecara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi:1) Industri Besar; dan2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota,3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di Bidang Industri dalam Lingkup perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Provinsi	1		1	1	100	1			

3	3	0				Prog.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	67		63	83	131.917 6319	64			
3	3	0	1.0			Keg.	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0		Sub Keg.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0		Sub Keg.	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0		Sub Keg.	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1		1	1	100	1			
										0		0	#DIV/0!		#REF!		#REF!

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3) 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target Program Dan Kegiatan (renja perangkat daerah Tahun n-1) 2023	Realisasi Program Dan Kegiatan (renja perangkat at daerah Tahun n-1) 2023	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)2022	Tingkat Realisasi			realisasi capaian program dan kegiatan s/d (tahun n-1) 2023	tingkat capaian target realisasi renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9	10	11=(5+7 +10)	12=11/4
3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70.05		62	0	0	64			
3 3 0 0 1 1.0 2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90		90	98.17	109.077 4282	90			
3 3 0 0 1 1.0 2 0	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100	1			
3 3 0 0 1 1.0 3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3 3 0 0 1 1.0 3 5	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4		0	0	#DIV/0!	4			

3 0	3 1	0 3	1.0 6	0	Sub Keg. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4		0	0	#DIV/0!	4			
3 0	3 1	0 5	1.0 5		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	1		0	0	#DIV/0!	1			
3 0	3 1	0 5	1.0 9	0	Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8		0	0	#DIV/0!	8			
3 0	3 1	0 6	1.0 6		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
						Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1		0	0	#DIV/0!	1			
3 0	3 1	0 6	1.0 1	0	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3 0	3 1	0 6	1.0 2	0	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3 0	3 1	0 6	1.0 4	0	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1		0	0	#DIV/0!	1			
3 0	3 1	0 6	1.0 5	0	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3 0	3 1	0 6	1.0 8	0	Sub Keg. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1		0	0	#DIV/0!	1			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
0	1	7					Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		0	0	#DIV/0!	0			
0	1	7		1												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0		0	0	#DIV/0!	0			
0	1	7		2												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1		0	0	#DIV/0!	1			
0	1	7		5												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		4	4	100	6			
0	1	7		6												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		0	0	#DIV/0!	-			
0	1	7		9												
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		0	0	#DIV/0!	-			
0	1	7		0												
3	3	0	1.0		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
0	1	8														

							Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	#DIV/0!			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		1	1	100	1		
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		1	1	100	1		
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		0	0	#DIV/0!	-		
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1		
3	3	0	1.0		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1		
							Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0	0	#DIV/0!			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4		4	3	75	4		
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4		4	4	100	4		

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10		0	0	#DIV/0!	10			
0	1	9	5													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7		7	7	100	7			
0	1	9	6													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		0	0	#DIV/0!	1			
0	1	9	9													
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		0	0	#DIV/0!	2			
0	1	9	0													
3	3	0			Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi	3		3	16	533.6666667	3			
0	6															
3	3	0	1.0		Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	77		76.61	80	104.7121786	77			
0	6	2					Indeks Kinerja PSMB	3		3	3	100	3			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3		3	2	66.66666667	3			
0	6	2	1													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	1		1	1	100	1			
0	6	2	2													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan	2		1	1	100	2			
0	6	2	3													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	155		145	158	108.9655172	150			
0	6	2	4													
								0		0	#DIV/0!		0			0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3) 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target Program Dan Kegiatan (renja perangkat daerah Tahun n-1) 2023	Realisasi Program Dan Kegiatan (renja perangkat at daerah Tahun n-1) 2023	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)2022	Tingkat Realisasi			realisasi capaian program dan kegiatan s/d (tahun n-1) 2023	tingkat capaian target realisasi renstra %
1	12	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9	10	11=(5+7 +10)	12=11/4
3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66		62	0	0	64			
3 3 0 0 1 1.0 2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90		90	98.20	109.112 5232	90			
3 3 0 0 1 2 1.0 2 0	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100	1			
3 3 0 0 1 3 1.0 3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0	0	#DIV/0!				
3 3 0 0 1 3 1.0 3 0 5	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	#DIV/0!				

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	B		0	0	#DIV/0!	B			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
							Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2		1	1	100	2			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	2		2	2	100	2			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1		1	1	100	1			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0		Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
0	1	7					Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
0	1	7		1												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	#DIV/0!	1			
0	1	7		2												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
0	1	7		5												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		6	3	50	6			
0	1	7		6												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		0	0	#DIV/0!	-	-		-
0	1	7		9												
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	1	100				
0	1	7		0												
3	3	0	1.0		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
0	1	8														

							Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0	#DIV/0!					
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2		2	2	100	2				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	#DIV/0!					
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1		1	1	100	1				
3	3	0	1.0	0	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100		1	1	100	100				
							Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8		6	6	100	8				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			0	0	#DIV/0!					

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0	0	#DIV/0!					
0	1	9	5														
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40		30	43	143.3333333		35			
0	1	9	6														
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2		2	2	100		2			
0	1	9	9														
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		0	0	#DIV/0!		1			
0	1	9	0														
3	3	0			Prog.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Layanan IKM	100		100	100	100		100			
0	2																
3	3	0	1.0		Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah layanan bagi Pelaku IKM	1,044		874	905	104		959			
0	2	1															
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2		2	2	100		2			
0	2	1	5														
										0		0	#DIV/0!		0		0

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil (n-3) 2021	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2) 2022			Target Program Dan Kegiatan (renja perangkat daerah Tahun n-1) 2023	Realisasi Program Dan Kegiatan (renja perangkat at daerah Tahun n-1) 2023	perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat at Daerah Tahun (n-2)2022	Tingkat Realisasi			realisasi capaian program dan kegiatan s/d (tahun n-1) 2023	tingkat capaian target realisasi renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6 x100%	9	10	11=(5+7 +10)	12=11/4
3 3 0 0 1	Prog. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66		62		0	64			
3 3 0 0 1 1.0 2	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	90		90	98.59	109.548 6435	90			
3 3 0 0 1 1.0 2 2	Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1		1	1	100	1			
3 3 0 1 1 1.0 3	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3 3 0 1 1 1.0 3 5	Sub Keg. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		0	0	#DIV/0!	1			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0		Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan ketatausahaan dan kepegawaian	B		B		0	#VALUE!	B			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3		0		0	#DIV/0!	3			
3	3	0	1.0		Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1		1	100	1			
							Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1		0		0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			0		0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0		0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			0		0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1		1		1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			0		0	#DIV/0!				

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
							Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		0	0	#DIV/0!	5			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		0	0	#DIV/0!	-	-		-
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		1	5	500	1			

3	3	0	1.0		Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
	0	1	8				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		0	0	#DIV/0!	1			
	0	1	8	1												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1		1	1	100	1			
	0	1	8	2												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
	0	1	8	3												
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0	0	#DIV/0!				
	0	1	8	4												
3	3	0	1.0		Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	1		1	1	100	1			
	0	1	9				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1		0	0	#DIV/0!	1			
	0	1	9	1												

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1		4	4	100				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			0	0	#DIV/0!				
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5		42	41	97.61904762	5			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	1	Sub Keg.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		0	0	#DIV/0!	1			
3	3	0	0	6	Prog.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	90		90	100	111.1111111	90			
3	3	0	1.0	1	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen	1		1	1	100	1			
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	4		4	4	100	4			

3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1		1	1	100	1			
0	6	1	2													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	19		13	39	300	16			
0	6	1	3													
3	3	0	1.0		Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	1		1	1	100	1			
0	6	3														
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	2		2	2	100	2			
0	6	3	1													
3	3	0	1.0	0	Sub Keg.	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Kasus yang Ditangani	4		4	5	125	4			
0	6	3	2													
									0		0	#DIV/0!		0		0
									0		0	#DIV/0!		0		0
										0						

2.1.3 Realisasi Program yang tidak memenuhi target

Tabel. 2.3
Rekapitulasi Program yang tidak memenuhi target
Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Nama Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	1	Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	%	100	98	97.57
	Jumlah			Rata-Rata			

2.1.4 Realisasi Program yang memenuhi target

Tabel. 2.4
Rekapitulasi Program yang memenuhi target
Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Nama Program		Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi %
1.	Pengembangan Ekspor	1	Pertumbuhan Industri besar	%	9,082.00	19,07	209,39
2.	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan		100	391	391

			dalam RPIP				
3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	3	Jumlah Alat yang di Kalibrasi		63	83	13,9176
4	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	4	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi		3	16	
5	Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen		90	100	11,11
	Jumlah			Rata-rata			

Faktor penyebab tercapainya target indikator kinerja antara lain:

1. Bertumbuhnya 3 industri besar di Sulteng selama tahun 2022 dari target pertumbuhan 3 industri besar.
2. Meningkatnya Ketahanan Industri Melalui Pemberian Fasilitas menyelenggarakan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri
 - b. Kegiatan Perluasan Penerapan Standar Industri

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

2.2.1 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Pembangunan dalam bidang perdagangan sangat penting dilakukan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Selama kurun waktu Tahun 2018-2022 neraca perdagangan Sulawesi Tengah cenderung meningkat, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 senilai US\$ 2.288,09 juta dan senilai US\$ 8.659,53 juta pada Tahun 2022. Kontribusi terbesar berasal dari besi dan baja dengan negara tujuan utama ekspor Tiongkok. Tabel neraca perdagangan Sulawesi Tengah tahun 2015-2020 tersaji pada tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Neraca Perdagangan Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor	5.109,18	5.893,47	7.480,65	12.139,52	19.016,73
Impor	2.821,09	3.134,92	2.384,94	7.153,36	10.357,2
NeracaPerdagangan	2.288,09	2.758,55	5.095,71	4.986,16	8.659,53

Sumber : BPS Sulteng 2023

Untuk capaian kinerja tahun 2022 urusan perdagangan lainnya juga dapat dilihat pada indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dengan target tahun 2022 sebesar 6,8 persen terealisasi 5,71 persen dengan persentase capaian sebesar 83,9 persen.

2.2.2 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Capaian kinerja urusan perindustrian tahun 2022 yang dilaksanakan melalui indikator kinerja kunci untuk pertumbuhan industri besar dari target 7,8 persen terealisasi sebesar 24,26 persen, dengan persentase capaian sebesar persen.

Sedangkan untuk indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sulawesi Tengah, capaian kinerjanya telah melampaui target yang diharapkan dalam Renja 2022 dengan target sebesar 11,59 persen, dengan realisasi mencapai sebesar 6,41 persen. Dari hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2022 secara umum capaian kinerja urusan Perindustrian telah melampaui target.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2022 tersaji pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tahun 2022

NO	Indikator	IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Aspek Pelayanan Umum											
	Pelayanan Urusan Pilihan											
	Perdagangan											
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)		10,29	10,59	10,99	11,59	6,80	0,92	20,07	7,07		5,71
2	Ekspor bersih perdagangan (jt USD)		900	1000	1100	1200	5.203,94	2288,1	2.758,55	5.095,71		8.659,74
3	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)					4-6	4-6					7,9
5	Inflasi pangan bergejolak (%)					3-5	3-5					4,14
	Urusan Perindustrian											
6	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)					11,37	11,69					37,59
7	Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)					1.097	1.371					13.359,62
8	Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)					67.823	67.911					133.240
9	Cakupan bina pelaku IKM (persen)					13,83	11-14					12,43

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

2.3.1.1 Bidang Industri

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Disperindag, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara hilir), optimalisasi percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri, sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, serta pemberdayaan industri.
2. Penguatan sistem informasi dan data industri, sebagai bagian dari pengendalian izin usaha industri serta pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, dan pemerintah daerah.
3. Memaksimalkan pembangunan sentra IKM khususnya di Kabupaten Morowali Utara, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui kegiatan: fasilitas pembentukan pengurus, meningkatkan kemampuan kegiatan usaha, mendirikan unit pelayanan teknis, pendidikan dan pelatihan bagi TPL dan konsultan bagi SIKIM di kabupaten/kota se Sulawesi Tengah;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan secara efektif Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2018-2038 dan memaksimalkan pembentukan peraturan daerah Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) diseluruh kabupaten/kota Sulawesi Tengah khususnya untuk Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Morowali dan Buol;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah akan memfasilitasi sertifikat halal produk pangan, fasilitasi pendampingan dan

- sertifikasi GMP bagi IKM pangan, fasilitasi pengujian nutrisi produk IKM pangan sosialisasi legalitas usaha pada 13 (tiga belas) kabupaten/kota Sulawesi Tengah;
6. Perlu dilakukan pendataan yang valid dan menyeluruh terutama tentang jumlah IKM di kabupaten/kota di Sulawesi Tengah dan melakukan pemetaan IKM-IKM unggulan daerah.
 7. Perlu pendataan perusahaan dan IKM besar yang mampu dan layak agar mampu di masukan kedalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).
 8. Izin makanan dalam negeri rumah cokelat belum dapat di terbitkan karena gedung sebagai tempat produksi harus di renovasi dan kedepannya makanan dalam negeri tersebut dapat segera diterbitkan.
 9. Meningkatkan sarana prasarana dan SDM aparatur pembina teknis/tenaga teknis teknis/operator mesin produksi baik rumah cokelat, rumah tenun maupun rumah kemasan yang ada di provinsi/kabupaten/kota.

2.3.1.2 Bidang Perdagangan

1. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pameran dagang internasional, nasional, dan lokal, peningkatan citra produk, serta pembinaan pelaku usaha ekspor.
2. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui optimalisasi pengendalian stabilisasi harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembinaan dan pengawasan sarana distribusi, pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan, promosi dan pemasaran produk dalam negeri guna mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
3. Peningkatan perlindungan konsumen melalui optimalisasi pengawasan barang beredar, pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen, serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
4. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi.

5. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, yang diindikasikan oleh tingkat inflasi yang terkendali, terutama inflasi kelompok bahan makanan melalui pendaftaran pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok
6. Revitalisasi sistem informasi harga barang kebutuhan pokok dengan menjadikan pedagang di pasar-pasar barometer baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang dapat di jadikan sebagai big data dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Pelaksanaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat harus mengacu pada pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan yang telah ditetapkan oleh menteri perdagangan setiap tahun:
 - a) Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih proaktif dalam proses pengajuan hibah.
 - b) Terkait pembangunan pasar yang terjadi permasalahan pada Kabupaten Toli-Toli atas keterlambatan pembangunan pasar agar dapat mengikuti anjuran KPPN dan tidak untuk melaksanakan pembangunan pasar tersebut dengan menggunakan biaya sendiri.
8. Terdapat beberapa kendala operasional dalam pelaksanaan sistem resi gudang, untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan gudang dan sarana prasarana penunjang, terutama pengelola gudang, akses pemasaran terhadap produk resi gudang serta ketersediaan lembaga pembiayaan. Selain itu, perlu dilakukan sinergi kebijakan terkait implementasi sistem resi gudang antara pemerintah pusat dan daerah terutama dukungan dan komitmen pemerintah daerah.
9. Melakukan koordinasi pengawasan provinsi dan kabupaten dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan di daerah.
10. Dalam rangka memaksimalkan pembentukan unit kemetrolgian legal provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah didorong untuk menjadi fasilitator dalam penyusunan kerja sama.
11. Pemerintah daerah penerima dana tugas pembantuan diharapkan lebih pro aktif dalam proses pengajuan hibah dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan

kapasitas sumberdaya manusia, baik itu pengelola pasar, pedagang, maupun konsumen salah satunya dengan melakukan “Program Pelatihan Teknik Pengelolaan Pasar”.

12. Pemerintah provinsi diharapkan turut memantau pembangunan pasar rakyat oleh pemerintah kabupaten dan kota yang telah mendapatkan bantuan tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
13. Dalam rangka meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pengembangan produk ekspor yang memiliki nilai tambah dan berdaya saing, yang dilakukan melalui strategi menentukan produk unggulan yang berorientasi ekspor berdasarkan sektor prioritas di Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Meningkatkan mutu produk ekspor dapat dicapai melalui peningkatan kelembagaan mutu di provinsi dan peningkatan pengawasan mutu.
15. Peningkatan akses dan pangsa pasar di dalam negeri dan luar negeri meliputi:
 - a. Pangsa pasar produk Sulawesi Tengah di pasar domestik
 - b. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi utama
 - c. Pertumbuhan ekspor non migas produk komoditi prospektif

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi berkaitan dengan kondisi yang dipandang sebagai kelemahan dan berpotensi menghambat pencapaian visi dan misi, antara lain:

2.3.2.1 Permasalahan Urusan Perdagangan

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri yang terintegrasi;
2. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat khususnya di daerah yang rawan gempa, tsunami dan likufaksi harus mempertimbangkan dan memperhatikan zona aman bencana yang telah ditetapkan oleh Badan Penggulangan Bencana Daerah dan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG) atau RTRW Provinsi Sulawesi Tengah;

3. UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang, olehnya itu di harapkan kepada kabupaten/kota agar dapat mengusulkan komoditas unggulan daerahnya untuk dilakukan pengujian dan mendapatkan sertifikasi mutu, sesuai dengan standar pengujian yang ada di UPT. PSMB.
4. Perlunya komunikasi yang intens Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah mengenai usulan program kegiatan kabupaten/kota yang didanai oleh dana DAK melalui aplikasi Krisna Simlaras di BAPENAS agar tidak terjadi miskomunikasi dalam penetapan rekomendasi usulan.
5. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar Swasta dengan Swasta (P to P) maupun Swasta dengan Pemerintah (P to G) serta Pemerintah dengan Pemerintah (G to G);
6. Perubahan regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perdagangan yang berlangsung cepat;
7. Rendahnya pemahaman, tahapan, dan regulasi perizinan oleh pemilik usaha;

2.3.2.2 Permasalahan Urusan Perindustrian:

1. Rendahnya daya saing, kualitas, dan inovasi produk industri
2. Masih terbatasnya pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi para pelaku usaha
3. Kontinuitas bahan baku industri kecil yang kurang, berpengaruh terhadap harga jual produk;
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang memadai
5. Minimnya biaya operasional pembinaan dan pendataan serta informasi yang valid dan up to date terkait dengan pelaku usaha
6. Kualitas SDM industri relatif masih rendah, khususnya pengrajin industri kecil sehingga kurang tanggap terhadap perubahan yang datang dari luar seperti teknis produksi, desain dan selera konsumen;
7. Rendahnya produktivitas dan efisiensi serta desain produk industri.

8. Kemampuan manajemen dan semangat kewiraswastaan pengusaha/ pengrajin relatif masih kurang;
9. Kawasan industri belum berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

2.3.3 Tantangan dan Potensi

2.3.3.1 Tantangan dan Potensi Urusan Perdagangan

1. Arus distribusi bahan kebutuhan pokok ke daerah-daerah lancar.
2. Ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok masyarakat terjamin.
3. Kondisi keamanan daerah yang aman dan kondusif.
4. Iklim investasi yang mendukung .
5. Revitalisasi pasar.
6. Penguatan kapasitas SDM untuk usaha informal.
7. Adanya sarana publikasi dan promosi tingkat nasional.

2.3.3.2 Tantangan dan Potensi Urusan Perindustrian

1. Potensi bahan baku cukup memadai.
2. Banyak instansi/lembaga yang menyalurkan bantuan.

2.3.4 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan.

Rekomendasi dan catatan yang strategis prioritas Tahun 2022 dapat diformulasikan sebagai berikut :

2.3.4.1 Rekomendasi dan catatan strategis Urusan Perdagangan

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pengawasan Peredaran Barang sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, namun karena keterbatasan manusia dan anggaran pada pemerintah provinsi, dimungkinkan dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten/kota dapat melakukan pengawasan barang atau jasa melalui pintu pengawasan BDKT atau pengawasan dalam rangka Perlindungan Konsumen.

2. Dalam rangka menstabilkan harga komoditi pertanian, perkebunan dan lain-lainnya, direkomendasikan dinas perindustrian dan perdagangan menindak lanjuti MOU antara Gubernur dengan Bupati terkait pengujian mutu di UPT. PSMB yang ada di Provinsi.
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pengawasan tanda daftar Gudang dan diharapkan kepada daerah melakukan pendaftaran Gudang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Pembangunan Pasar DAK (dana alokasi Khusus) maupun Tugas Pembantuan (TP), diharapkan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait dengan hal tersebut kiranya Kabupaten/Kota dapat memberikan data Pasar yang telah ber-SNI pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.
5. Pasar Murah wajib dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota dalam rangka merayakan hari besar ke-Agamaan Nasional.
6. Pelaksanaan Tera-tera ulang terhadap UTTP diharapkan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota sudah melakukan MOU dengan Pemda Kota Palu dan mendorong agar segera menyiapkan sumber daya manusia Kemetrolagian dan sarana perasarana untuk melaksanakan Tera-Tera Ulang sendiri.
7. Kabupaten/Kota dapat mendukung program Sistem Perdagangan Antar Pulau dengan memberikan data valid yang dapat dipertanggung jawabkan termasuk penginputan data Pelaku Usaha, Distributor, Sub-Distributor, dan Agen Bahan Pokok pada Tanda Daftar Perusahaan Usaha Distribusi (TDPUD).
8. Dibutuhkan data potensi komoditi yang dapat diekspor, agar hal tersebut dapat disampaikan kepada “buyer” pada kegiatan TEI (*Trade Expo Indonesia*). Data yang disajikan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan.
9. Dalam rangka mendorong hilirisasi komoditas unggulan daerah yang berdaya saing ekspor, maka diharapkan kepada seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah segera menyusun data potensi komoditi ekspor daerahnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

10. Data potensi komoditi tersebut juga akan digunakan pada misi dagang mendatang sehingga produk unggulan Sulawesi Tengah dapat diperkenalkan pada pertemuan misi dagang tersebut.
11. Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPT. PSMB) mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, karenanya diharapkan kepada Kabupaten/Kota agar dapat mengusulkan komoditas unggulan daerahnya untuk dilakukan pengujian dan mendapatkan sertifikasi mutu, sesuai dengan standar pengujian yang ada di UPT. PSMB.
12. Laboratrium UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merupakan salah satu Laboratrium Pengujian Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Pengujian Komoditi yang telah terakreditasi terdiri dari 8 ruang lingkup, yaitu Biji Kakao, Beras, Gabah, Jagung, Kopra, Rumput Laut Cengkeh dan Biji Kopi. Untuk tahun 2018 ini, Laboratrium Pengujian akan menambah ruang lingkup pengujian akreditasi yaitu CPO (Crude Palm Oil/ Minyak Sawit Mentah, Bawang Merah, dan Derajat Sosoh Beras.
13. Dalam perkembangan saat ini, Laboratrium Pengujian UPT. PSMB juga dapat melakukan pengujian di luar ruang lingkup akreditasi dan melakukan kalibrasi alat ukur, antara lain : Garam, Minyak Nilam, Kakao Bubuk, Tepung Terigu dan Cemaran Logam, yang meliputi : hasil Pertanian, hasil Perikanan, hasil Perkebunan, Produk Hasil Olahan, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Mainan Anak, Pakaian Anak, dll. Untuk pelaksanaan tugas Kalibrasi Alat Ukur Besaran kalibrasi yaitu : Dimensi, Massa, Suhu, Volumetrik
14. Sejak tahun 2015 telah dilakukan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Toli-Toli mengenai peningkatan standar mutu komoditi. Untuk kabupaten/kota lainnya agar dapat melakukan penguatan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan masih banyaknya komoditi yang belum berstandar nasional.

2.3.4.2 Rekomendasi dan catatan strategis Urusan Perindustrian

1. Undang - Undang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perindustrian menegaskan bahwa setiap Gubernur, Bupati, dan Walikota harus menyusun Rencana

Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017-2037, sementara dalam tahapan di Kemendagri. Perda RPIP akan menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/ Kota se Sulawesi Tengah untuk segera menyusun Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

2. Bagi kabupaten yang belum melakukan penyusunan RPIK agar segera dapat memulai dan melakukan penyusunan RPIK untuk keberlanjutan mendapatkan DAK sektor industri.
3. Kabupaten dan kota yang telah dan sedang melaksanakan kegiatan DAK SIKIM agar mempersiapkan laporan pelaksanaan DAK SIKIM.
4. Dalam rangka memfasilitasi permasalahan tentang organisasi UPT di dalam SIKIM yang merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemda, bahwa keberadaan SIKIM di kabupaten untuk membentuk UPT.
5. Dukungan koordinasi dan fasilitas dalam bentuk Bimtek dan Sosialisasi tantangan Penerapan Standar Mutu Industri dari Perindag Provinsi kepada Kab. dan Kota yang mendapatkan DAK SIKIM di sesuaikan dengan jenis SIKIM yang ada di kabupaten dan kota.
6. Adanya dukungan fasilitas baik Dinas Perindag Provinsi dan Kementerian Perindustrian terhadap ketersediaan SKKNI yang di sesuaikan dengan jenis sentra yang ada di Kabupaten dan Kota.
7. Terdapat 3 (Tiga) Kabupaten yang hanya mencantumkan nomenklatur dinas perdagangan, agar segera bisa meninjau kembali perubahan nomenklatur dinas yang memuat arah pembangunan sektor industri, karena tanpa nomenklatur Perindustrian maka kecil kemungkinan untuk mendapatkan DAK Sektor Industri.
8. Untuk menumbuhkan Wirausaha Baru di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah yang Berbasis Teknologi Informasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi berkewajiban memberikan pembinaan dan pelatihan bagi generasi muda atau pelaku IKM tentang mempromosikan Produk IKM atau membentuk Inkubator Bisnis

Teknologi Informasi (IBTI) dengan tujuan utama untuk mencetak wirausaha baru di bidang teknologi informasi.

9. Penguatan Usaha Sektor Perdagangan

Pengembangan perdagangan yang berbasis sumber daya alam lokal dan menyerap tenaga kerja cukup tinggi, menghasilkan nilai tambah yang cukup besar, berfungsinya mekanisme pasar tanpa distorsi sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk meningkatkan pengadaan dan penyaluran barang, ekspor nonmigas, memberdayakan pelaku usaha agar produktif dan berdaya saing.

10. Peningkatan Daya Saing

Penguatan pilar-pilar otonomi dalam fungsi perencanaan pembangunan daerah antara lain dalam bentuk penerapan pendekatan pembangunan sektor perdagangan untuk mencari dan menetapkan potensi unggulan dan prospektifnya, menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha untuk menanamkan dan mengembangkan produksi, pemberian insentif dan kemudahan. Selain itu peningkatan nilai tambah produksi yang telah ada yang memiliki ciri khas dan unggul melalui penerapan teknologi maju dan tepat akan dapat meningkatkan daya saing produk Sulawesi Tengah di pasar regional, nasional dan global.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 tersaji pada tabel 2.7 berikut:

RKPD
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN/BIDAN G URUSAN/PROG RAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/K EGIATAN/SU B KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REAL ISASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAK IRAA N CAPA IAN TARG ET RENJ A OPD TAHU N 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUN G JAWA B
							TAR GET 2024	PAGU INDIKAT IF (Rp)	LOK ASI	SUMB ER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
											NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHA N PILIHAN						22,319,5 69,179.4 8							21,655, 401,47 1	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG PERDAGANGA N						19,840,6 60,179.4 8							20,028, 601,57 1	
1 .	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH PROVINSI						16,548,3 34,529.4 8				Percep atan Refor masi Birokr asi			16,610, 356,35 6	Dinas Perind ustrian dan Perdag angan Provin si Sulawe si Tengah

			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)				66									
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							695.142.121,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			758,358,723	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Nilai SAKIP Disperindag (Indeks)					80		(SULAWESI TENGAH)				83			
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							535.323.121,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertu Stabilitas Polhuk hankam dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			588,855,433	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		1.00	1.00	1.00			(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				1.00			
3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							12.825.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertu Stabilitas Polhuk hankam dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		14,107,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TEN GAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00		
3.30.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen							7.350.000,00	(SULAWESI TEN GAH)		Mempertuastabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		8,085,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TEN GAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00		
3.30.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							5.725.100,00	(SULAWESI TEN GAH)		Mempertuastabilitas Polhukankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		6.297.610,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TEN GAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00		

			Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)						GAH)							
3.30.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						3.750.200,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		4,125,220	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00			
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						130.168.700,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		143,185,570	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00			
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.747.942.083,48	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi			13,819,610,908	Dinas Perindustrian dan	

			Persentase realisasi anggaran (Persentase)			90		GAH)			Birokrasi		90		Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.792.253.833,48	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			11.792,253,833	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)		103.00	104.00	105.00		(Kota Palu, SULAWESI TENGAH)				105.00			
3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						1.239.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1,239,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00		

13,031,253,833

3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		500.00	500.00	500.00	376.270.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhuk hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.00	413,897,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3.30.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)		12.00	12.00	12.00	72.053.800,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhuk hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.00	79,259,180	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Paket)				1	6.600.000,00	(Kota Palu, SULAWESI TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			

									Alokasi Umum						
3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						53.257.500,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		58,583,305	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)		15	15	15			(SULAWESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15		
3.30.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						92.009.100,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		101,210,010	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)		5.00	5.00	5.00			(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.00		

3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		14.00	14.00	14.00	67.037.800,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhuk Hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.00	73,741,580	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3.30.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		1.00	1.00	1.00	56.060.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhuk Hankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00	61,666,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						257.626.030,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			283,388,633	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

			Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)				14		(SULAWESI TENGAH)			si		14		angan Provinsi Sulawesi Tengah
3.30.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							93.110.000,00	(SULAWESI TENGAH)	Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi				102,421,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		10.00	10.00	10.00			(Kota Palu, SULAWESI TENGAH)				10.00			
3.30.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD							65.177.080,00	(SULAWESI TENGAH)	Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			71,694,788	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1.00	1.00	1.00			(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00			

3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2.00	2.00	2.00	31.624.950,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.00	34,787,445	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)						(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.00	1.00	1.00	67.714.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00	74,485,400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)						(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						114.189.000,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			125,607,900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stakeholder)(Indeks)				88.5		(SULAWESI TENGAH)					90		
3.30.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							32.825.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		4.00	36,107,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		4.00	4.00	4.00			(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)							
3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							74.764.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0.00	82,240,400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		12.00	16.00	12.00			(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)			Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
3.30.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							6.600.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		7,260,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		42.00	42.00	42.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)		m dan Transf ormasi Pelayanan Publik		n	42.00		Provinsi Sulawesi Tengah
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						499.612.481,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			549,573,729	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Dokumen)				1		(SULAWESI TENGAH)					1		
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)						(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)					0.00		
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.911.297,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transf ormasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			14,202,427	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		4.00	4.00	4.00		(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)					4.00		
3.30.01. 1.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							182.514. 259,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Stabilit as Polhuk hanka m dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Percep atan Reform asi Birokra si	Dinas Perind ustrian dan Perda ganga n		200,76 5,685	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		4.00	4.00	4.00			(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)				Dinas Perind ustrian dan Perda ganga n	4.00		
3.30.01. 1.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan							60.389.9 25,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Stabilit as Polhuk hanka m dan Transf ormasi Pelaya nan Publik	Percep atan Reform asi Birokra si	Dinas Perind ustrian dan Perda ganga n		66,428, 918	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		4.00	4.00	4.00			(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)				Dinas Perind ustrian dan Perda ganga n	4.00		

3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12.00	12.00	12.00	50.400.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.00	55,440,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50.00	75.00	76.00	193.397.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	77.00	212,736,700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					139.106.494,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			153,017,143	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Dokumen)						(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				0.00		
			Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)			1			(SULAWESI TENGAH)				1		
3.30.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						139.106.494,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		0.00	153,017,143	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		7.00	15.00	9.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)							
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						486.940.400,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		535,634,440	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		12.00	12.00	12.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.00		
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						182.761.620,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		201,037,782	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		4.00	4.00	4.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.00		
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						424.714.300,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			467,185,730	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Dokumen)						(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)					0.00		

			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				1		(SULAWESI TENGAH)					1		
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							239.034.300,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			262,937,730	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		35.00	35.00	35.00			(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				35.00			
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							140.680.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		154,748,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		117.00	115.00	110.00			(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.00			

	3.30.01.1.09.001.0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		49,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir Rehabilitasi (Unit)		1.00	1.00	1.00			(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.00			
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						339,310,000.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		373,241,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Persentase rekomendasi SIUP B2/MB-Gol.B /MB Gol. C (%)					100									

			Persentase penerbitan SKA (%)				100						Dinas Perind ustria n dan Perda ganga n			
	3.30.02. 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi						72.809.1 00,00	(SUL AWE SI TEN GAH)				Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat		80,090, 010	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
		Jumlah dokumen Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar di Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)					1		(SUL AWE SI TEN GAH)					1		

	3.30.02.1.02.0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						72.809.100,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			80,090,010	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)		0.00	0.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				1.00			
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						266.500.900,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan			293,150,990	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

												Penda patan Masyar akat				
			Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA (Laporan)				1		(SUL AWE SI TEN GAH)					1		
3.30.02. 1.04.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA							266.500. 900,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi untuk Pertum buhan yang Berkua litas dan Berkea dilan	Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat			293,15 0,990	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat		1.00	1.00	1.00		(Sula wesi Teng ah,					1.00		

			Keterangan Asal (Dokumen)						SULAWESI TENGAH)							
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						145,468,000.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	Aparat, Pelaku Ekspor, dan Stakeholder terkait		160,014,800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi(%)				100									
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						145.468.000,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Pening			160,014,800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)					1.00		
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas						45.468.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha / Masyarakat, stakeholder terkait		50,014,800	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi (Orang)		0.00	2.00	2.00		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)				Pelaku Usaha / Masyarakat, stakeholder terkait	2.00		
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						1,860,713,600.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah			2,046,784,960	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok (%)				100				h yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masya rakat	Pelak u Usaha / Masya rakat, stakeh older terkait			
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						125.609.400,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat			138,170,340	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang				1		(SUL AWE SI TEN GAH)			1			

			Penting di Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)													
	3.30.04. 1.01.000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						125.609. 400,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi untuk Pertum buan yang Berkua litas dan Berkea dilan	Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat			138,17 0,340	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor (Laporan)			4.00	4.00	4.00		(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)					4.00		

3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						1.638.770.750,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pempatan Masyarakat			1.802,647,825	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag (Dokumen)				1		(SULAWESI TENGAH)				1				
3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						321.262.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan			353,388,200	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

											Penda patan Masyar akat				
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Ko ta(Laporan)		4.00	4.00	4.00		(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)				4.00		
3.30.04. 1.02.000 2	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.317.50 8.750,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi untuk Pertum buhan yang Berkua litas dan Berkea dilan	Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat	Stakeh older terkait, pelaku usaha, masya rakat		1,449,2 59,625	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Laporan)		6.00	6.00	6.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				Stakeholder terkait, pelaku usaha, masyarakat	6.00		
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						96.333.450,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			105,966,795	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (%)				100		(SULAWESI TENGAH)					100		

	3.30.04. 1.03.000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida						96.333.450,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			105,966,795	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				1.00			
5	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						700,540,400.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah			567,281,440	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Nilai ekspor (USD)				23.64 1,6E 6					h dan Penda patan Masya rakat	Stake holder terkait , pelaku usaha, masya rakat, petani			
	3.30.05. 1.01	Penyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						700.540. 400,00	(SUL AWE SI TEN GAH)			Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat			567,28 1,440	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
		Jumlah Annual Report Penyelenggar aan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang					1		(SUL AWE SI TEN GAH)				1			

			bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Laporan)													
3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional						184.830.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat				203,313,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)		3.00	3.00	6.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)					6.00			

	3.30.05. 1.01.000 2	Pameran Dagang Lokal					300.794. 500,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi untuk Pertum buhan yang Berkua litas dan Berkea dilan	Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat	Aparat , Pelaku Usaha, Ekspor tir, dan Stakeh older terkait		330,87 3,950	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)		37	24	24	(SUL AWE SI TEN GAH)				Aparat , Pelaku Usaha, Ekspor tir, dan Stakeh older terkait Aparat , Pelaku Usaha, Ekspor tir, dan Stakeh older terkait	30		
			Honora rium Narasu mber atau Pemba has, Modera tor, Pemba wa Acara, dan Panitia (Paket)				1	1.700.00 0,00	(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)	PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD), Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum					

	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor						214.915.900,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	Aparat, Pelaku Usaha, Eksporir, dan Stakeholder terkait		236,407,490	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi (Produk)		2.00	2.00	3.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				Aparat, Pelaku Usaha, Eksporir, dan Stakeholder terkait	2.00		
6	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						246,293,650.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah			270,923,015	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi (%)				20					h dan Penda patan Masya rakat	Aparat , Pelak u Usaha , Ekspo rtir, dan Stake holder terkait			
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						200.000.000,00	(SUL AWE SI TEN GAH)			Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat			220,000,000	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam				1		(SUL AWE SI TEN GAH)					1		

			Negeri (Laporan)													
3.30.07. 1.02.000 2	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi							200.000. 000,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi untuk Pertum buhan yang Berkua litas dan Berkea dilan	Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat			220,00 0,000	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)		0.00	0.00	25.00			(Sula wesi Teng ah, Kab Dong gala, SULA WESI TEN GAH)				25.0 0			

	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						46.293.650,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat		50,923,015	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)				1		(SULAWESI TENGAH)				1		
	3.30.07.1.03.0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						46.293.650,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Penda		50,923,015	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)			patan Masyar akat		1.00		
	3.31	URUSAN PEMERINTAH N BIDANG PERINDUSTRIA N						2,478,90 9,000.00							1,626,7 99,900	
1	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI						2,052,42 9,600.00				Menin gkatka n Daya Saing produ k dan komod itas Unggu lan Daera h yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masya rakat			1,157,6 72,560	Dinas Perind ustrian dan Perdag angan Provin si Sulawe si Tengah

			Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)				100						Pelaku Usaha, masyarakat, stakeholder terkait			
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						2.052.429.600,00	(SULAWESI TENGAH)				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat		1,157,672,560	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
			Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)				1		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)					1		

3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						1,076,277,000.00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat		3.00	83,904,700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri(Dokumen)		2.00	3.00	3.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)							
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						186.050.750,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak	IKM, Aparatur ASN, Masyarakat		204,655,825	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

										dilan	pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat				
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)		2.00	2.00	2.00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)			IKM, Aparatur ASN, Masyarakat	2.00		
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Paket)				1	19.400.000,00	(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaku Usaha, IKM, Aparat Pembina Industri			
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri							170.051.300,00	(SULAWESI TENGAH)	Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdaya Impact pada Peningkatan	Pelaku Usaha, IKM, Aparat Pembina Industri		187,056,430	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)		1	1	1		(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)		Peningkatan Nilai Tambah dan Pempatan Masyarakat	Pelaku Usaha, IKM, Aparat Pembina Industri	1			
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Paket)				1	68.649.400,00	(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaku Usaha, IKM, Aparat Pembina Industri				
		Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan (Paket)				1	5.500.000,00	(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pelaku Usaha, IKM, Aparat Pembina Industri				

	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						160.050.850,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha, IKM, Aparat Pembinaan Industri		176,055,935	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)		1.00	1.00	1.00			(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				Pelaku Usaha, IKM, Aparat Pembinaan Industri	1.00		
		Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(Paket)				1	21.154.000,00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha, IKM, Industri Besar, Aparat Pembinaan Industri, stakeholder terkait			
		Honorarium Narasumber atau Pemba has,				1	19.600.000,00		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana			Pelaku Usaha, IKM, Industri Besar, Aparat			

			Moderator, Pemba wa Acara, dan Panitia (Paket)						GAH)	Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum			Pembi na Industr i, stakeh older terkait			
2 .	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIA N IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis (%)						224,429, 900.00				Menin gkatka n Daya Saing produ k dan komod itas Unggu lan Daera h yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masya rakat	Pelak u Usaha , IKM, Indust ri Besar, Aparat Pembi na Industr i, stakeh older terkait	246,87 2,890	Dinas Perind ustrian dan Perdag angan Provin si Sulawe si Tengah
							100									

3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						224.429.900,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			246,872,890	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi (Laporan)				1		(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				1			
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi						119.581.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah			131,539,100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

										litas dan Berkea dilan	yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat		1		
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)		1	1	1		(SUL AWE SI TEN GAH)							

3.31.03. 1.01.000 4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						104.848. 900,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi untuk Pertum buhan yang Berkua litas dan Berkea dilan	Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat	Industr i Besar, Menen gah, dan Kecil, Pelaku Usaha, Aparat ur		115,33 3,790	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1)		1.00	1.00	1.00			(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)				Industr i Besar, Menen gah, dan Kecil, Pelaku Usaha, Aparat ur	1.00		

			Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas (%)				87					Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	Industri Besar, Kecil, dan Menengah, Pelaku Usaha, Aparatur Industri			
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						202.049.500,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			222,254,450	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

			Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)(Dokumen)				1		(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)					1		
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							65.365.750,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			71,902,325	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem		1.00	1.00	1.00			(Sulawesi Tengah, SULA WESI TENGAH)					1.00		

		Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)													
3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas						88.331.750,00	(SULAWESI TENGAH)		Mempertahankan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	Pelaku Usaha, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur		97,164,925	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas (Dokumen)		1.00	1.00	1.00			(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)				Pelaku Usaha, Industri Besar, Kecil, Menengah, dan Aparatur	1.00		
	Honorarium Narasumber atau Pemahas, Moderator, Pembahas				1	8.900.000,00	(Sulawesi Tengah, SULAWESI TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-				Pelaku Usaha, IKM, Industri Besar, Aparat Pembina			

			wa Acara, dan Panitia (Paket)						Dana Alokasi Umum							
3.31.04. 1.01.000 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas						48.352.0 00,00	(SUL AWE SI TEN GAH)		Memp erkuat Ketaha nan Ekono mi untuk Pertum buhan yang Berkua litas dan Berkea dilan	Mening katkan Daya Saing produk dan komodi tas Unggul an Daerah yang Berda mpak pada Pening katan Nilai Tamba h dan Penda patan Masyar akat	Pelaku Usaha, IKM, Industr i Besar, Aparat Pembina		53,187, 200	Dinas Perindu strian dan Perdag angan Provinsi Sulawe si Tengah	
		Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(Sula wesi Teng ah, SULA WESI TEN GAH)				Pelaku Usaha, IKM, Industr i Besar, Aparat Pembina	1.00			
	J U M L A H						22.319.5 69.179,4 8							21,655, 401,47 1		

RKPD
UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (PSMB) PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra a OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJANG OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANG OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3,796,934,380.00							1,485,504,648	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3,796,934,380.00							1,485,504,648	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					66	3,477,870,571.00				Percepatan Reformasi Birokrasi			866,440,415	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						329.760.000,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi		90	329,760,000	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
			Persentase Realisasi Anggaran (%)				90		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)							
	3.30.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						329.760.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1.00	329,760,000	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)		1.00	1.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)							
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						174.070.590,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi		1	191,477,649	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
			Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)				1		(SULAWESI TENGAH)							

3.30.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi						3.237.250,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			3,560,975	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1.00	2.00	2.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				2.00			
3.30.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						51.028.190,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT PSMB		56,131,009	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)		2.00	2.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT PSMB	1.00		
3.30.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.539.150,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT PSMB		28,093,065	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1.00	1.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT PSMB	1.00		
3.30.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						94.266.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT PSMB		103,692,600	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT PSMB	1.00		
3.30.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)				1	2.660.219.285,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi		0	0	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
								(SULAWESI TENGAH)							

3.30.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		6.00	6.00	6.00	2.660.219.285,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		0	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				1	219.078.696,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi		1	240,986,566	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.30.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		1.00	1	1	4.998.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		1	5,497,800	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.30.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2.00	2.00	1.00	168.737.496,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT PSMB	1.00	185,611,246	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
3.30.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1.00	1.00	1.00	45.343.200,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT PSMB	1.00	49,877,520	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

2.	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)			1	94.742.000,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi		1	104,216,200	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
	3.30.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya(Unit)		6.00	8.00	4.00	4.182.000,00	(SULAWESI TENGAH)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		4.00	4,600,200	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
	3.30.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		4.00	4.00	4.00	47.950.000,00	(SULAWESI TENGAH)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang	4.00	52,745,000	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
	3.30.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		7	7	7	42.610.000,00	(SULAWESI TENGAH)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT PSMB	7	46,871,000	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					319,063,809.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai			619,064,233	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

			Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi (%)				3				Tambah dan Pendapatan Masyarakat	UPT PSMB			
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							319.063.809,00	(SULAWESI TENGAH)		Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			619,064,233	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)				77			(SULAWESI TENGAH)				77		
		Indeks Kinerja PSMB (Indeks)				4			(SULAWESI TENGAH)				4		
3.30.06.1.02.004	Pengembangan Layanan Kalibrasi							90.210.050,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat		180,507,311	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan (Sertifikat)		158.00	150.00	155.00			(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				160.00		

3.30.06.1.02.005	Pengembangan Layanan Pengujian						79.745.809,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	UPT PSMB		174,769,222	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan (laporan)		1.00	1.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT PSMB	1.00		
3.30.06.1.02.006	Pemantauan Mutu Produk						79.786.200,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	SDM Aparat Teknis UPT PSMB		140,645,300	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Jumlah produk potensial yang dipantau (Produk)		2.00	3.00	3.00		(SULAWESI TENGAH)				SDM Aparat Teknis UPT PSMB	4.00		
3.30.06.1.02.007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi						69.321.750,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	SDM Aparat Teknis UPT PSMB		123,142,400	UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang (PSMB)
		Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan (Sertifikat)		1.00	2.00	2.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				SDM Aparat Teknis UPT PSMB	2.00		

JUMLAH								3.796.934.380,00							1,485,504,648	

RKPD
UPT. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode Renstra OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJANG OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJANG OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1,602,463,965.00							1,859,463,515	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						1,602,463,965.00							1,859,463,515	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	 <													

3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)				1	69.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi		1	75,900,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		0.00	0.00		31.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi		0.00	34,100,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1.00	1.00	1.00	4.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT P2K	1.00	4,400,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.00	1.00	1.00	34.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	upt p2k	1.00	37,400,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				1	46.956.915,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi		1	51,652,607	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

3.30.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.00	1.00	1.00	45.456.915,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	1.00	50,002,607	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0.00	0.00		1.500.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	upt p2k upt p2k	1,650,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				1	37.516.900,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi	1	41,268,590	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
3.30.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		4.00	1.00	1.00	26.856.900,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	1.00	29,542,590	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

3.30.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.660.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	UPT P2K		11,726,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		42.00	5.00	5.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT P2K	5.00		
2.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					1,197,830,150.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	UPT P2K		1,454,829,700	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)				90									
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						998.915.075,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			1,127,415,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen(Laporan)				1		(SULAWESI TENGAH)					1		

3.30.06.1.01.001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						875.600.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			905,036,100	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif (BPSK)		4	4	4		(SULAWESI TENGAH)				4			
3.30.06.1.01.002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen						47.715.075,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	upt p2k		120,415,000	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Jumlah Lembaga Perlindungan		1	1	1		(SULAWESI TENGAH)				upt p2k	1		
		Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif (LPKSM) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Paket)				1	45.600.000,00	(kab/kota, SULAWESI TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			upt p2k			

3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota					1	198.915.075,00	(SULAWESI TENGAH)			Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat		1	327,414,700	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Laporan)						(SULAWESI TENGAH)							
3.30.06.1.03.003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						120.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat		2.00	163,707,350	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi (Laporan)		2.00	2.00	2.00		(SULAWESI TENGAH)							
3.30.06.1.03.004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						78.915.075,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat	pelaku usaha, konsumen		163,707,350	UPT. Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
		Jumlah Kasus yang Ditangani (Kasus)		4.00	6	8		(SULAWESI TENGAH)				pelaku usaha, konsumen	4.00		

J U M L A H								1.602.463.965,00							1,859,463,515	

RKPD
UPTD PENGEMBANGAN PRODUK INDUSTRI PANGAN DAN KERAJINAN (P2IPK) PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Period e Renst ra OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARG ET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2,001,014,070 .00							2,139,363,47 7	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						997,672,570.0 0							1,035,687,82 7	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	 													

3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						89.776.500,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			98,754,150	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)				1.00		(SULAWESI TENGAH)					1.00		
3.30.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.140.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			4,554,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1.00	2.00	2.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)					2.00		
3.30.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						47.010.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT P2IPK		51,711,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		2.00	2.00	2.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT P2IPK	2.00		
3.30.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						12.286.500,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT P2IPK		13,515,150	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		1.00	1.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT P2IPK	1.00		
3.30.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.640.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT P2IPK		12,804,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)

		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT P2IPK	1.00		
3.30.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						14.700.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT P2IPK		16,170,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		1.00	1.00	1.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)				UPT P2IPK	1.00		
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						183.976.070,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			202,373,677	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				1.00		(SULAWESI TENGAH)					1.00		
3.30.01.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						179.926.070,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			197,918,677	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		2.00	2.00	2.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)					2.00		
3.30.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.050.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT P2IPK		4,455,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1	1	1		(SULAWESI TENGAH)				UPT P2IPK	1		

	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.400.000,00	(SULAWESI TENGAH)			Percepatan Reformasi Birokrasi			117,040,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
			Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)				1.00		(SULAWESI TENGAH)					1.00		
	3.30.01.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						80.000.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi			88,000,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		6.00	8.00	8.00		(SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGAH)					8.00		
	3.30.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.400.000,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	UPT P2IPK		29,040,000	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		30.00	35.00	40.00		(SULAWESI TENGAH)				UPT P2IPK	40.00		
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,003,341,500.00							1,103,675,650	
1.	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1,003,341,500.00				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			1,103,675,650	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)

			Persentase Layanan IKM (%)				100						UPT P2IPK			
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						1.003.341.500,00	(SULAWESI TENGAH)				Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			1,103,675,650	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)				1		(SULAWESI TENGAH)					1			
3.31.02.1.01.005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1.003.341.500,00	(SULAWESI TENGAH)		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan		Meningkatkan Daya Saing produk dan komoditas Unggulan Daerah yang Berdampak pada Peningkatan Nilai Tambah dan Pendapatan Masyarakat			1,103,675,650	UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan (P2IPK)
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)		2.00	2.00	2.00		(SULAWESI TENGAH)					0.00			
JUMLAH							2.001.014.070,00								2,139,363,477	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Program Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian antara lain:

1. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah pengembangan industri petrokimia di Teluk Bintuni. Pengembangan industri industrial vegetable oil / industrial lauric oil (IVO/ILO), dimana IVO/ILO merupakan hasil pemrosesan CPO yang menurunkan kadar getah dan metal.
2. Kegiatan prioritas dalam rangka penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan Koperasi. Pengembangan sentra industri kecil menengah (IKM) dan mengembangkan produk IKM.
3. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Melakukan pendampingan pada pabrik untuk meningkatkan ekspor. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah ajang temu bisnis Internasional.
4. Kegiatan prioritas dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0. Kemenperin berencana mengembangkan data industri 4.0 dan pembangunan pusat inovasi dan pengembangan industri 4.0.
5. Kegiatan prioritas dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing SDM. Hal tersebut akan dilakukan melalui pelatihan industri berbasis kompetensi dan pendidikan vokasi dan kejuruan industri berbasis kompetensi menuju dual system.
6. Program Pelaksanaan Anti Korupsi.

3.1.2 Program Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional Kementerian Perdagangan antara lain :

1. Pembangunan dan revitalisasi 119 unit pasar rakyat tipe C dan D.
2. Membangun pusat jajanan dan souvenir.
3. Menjalankan Program perlindungan konsumen.
4. Program optimalisasi pemanfaatan Sistem Resi Gudang.
5. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri dan stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting.

6. Pelaksanaan EXPO
7. Melaksanakan program misi dagang, pameran, dan promosi luar negeri.
8. Program untuk perundingan dan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional.
9. Program pemberian fasilitas perizinan dan fasilitas ekspor impor.
10. Program pengembangan sarana dan prasarana Kemendag.
11. Program pengembangan sumber daya manusia Kemendag.
12. Program pelaksanaan anti Korupsi.

3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas

a. Tujuan Dinas

Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 adalah antara lain :

1. Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan.
2. Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan.

b. Sasaran Dinas

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya kinerja Sektor Perdagangan.
 2. Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas.
- Selengkapnya relasi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tujuan umum dan sasaran pembangunan industri dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 tersaji pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan PDRB Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja Sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	6,70	6,80	6,90	7,00	7,10	7,20
			2 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan (Juta USD)	3.828,92	5.203,94	5.849,88	6.648,15	6.903,07	7.274,98
			3 Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6	4-6
			4 Inflasi pangan bergejolak (%)	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
2	Meningkatkan PDRB Sektor Industri Pengolahan		5 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Non Migas (%)	11,37%	11,69%	12,00%	12,60%	13,20%	13,80%

		2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas	6 Nilai ekspor produksi industry non-migas (US\$ juta)	1.097	1.371	1.646	1.920	2.194	2.468
			7 Jumlah tenaga kerja di sektor industry (jiwa)	67.823	67.911	68.000	68.088	68.176	68.264
			8 Cakupan bina pelaku IKM (persen)	13,83	11-14	11-14	11-14	11-14	11-14
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	3 Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif, efisien dan transparan	9 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,05	64,5	66,5	68,5	70	71

Strategi dan Kebijakan

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI : Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Perdagangan	1 Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	1 Meningkatkan Sistem pelayanan Perizinan dan Pengendalian Pusat Distribusi	1 Melaksanakan Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
			2 Penyediaan Sarana dan prasarana pusat distribusi Regional dan Provinsi
			3 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
		2 Meningkatkan Pengendalian harga, ketersediaan Kebutuhan Pokok dan pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	1 Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			2 Melaksanakan koordinasi, pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida
		3 Meningkatkan promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri	1 Melaksanakan fasillitasi promosi, pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri
			2 Meningkatkan sistem dan jaringan informasi

			perdagangan
		4 Meningkatkan promosi dagang produk ekspor dan pemberdayaan kelembagaan perlindungan konsumen	1 Melaksanakan pameran dagang dan pembinaan pelaku usaha ekspor
			2 Melaksanakan layanan sertifikasi dan pengujian mutu produk

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju			
MISI: Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Peningkatan Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan	2 Meningkatnya kinerja Sektor Industri Pengolahan	5 Meningkatkan produktivitas dan daya saing industri	1 Mengembangkan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
			2 Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sarana produksi IKM
		6 Meningkatkan Pelayanan dan komitmen Perizinan usaha dan industri	1 Meningkatkan pelayanan perizinan usaha industri
			2 Memfasilitasi sistem pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
		7 Meningkatkan penyediaan informasi dan data	1 Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

		perusahaan industri	2 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan kawasan industri
--	--	---------------------	---

3.3 Program dan Kegiatan

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang akan dilaksanakan terdiri dari 10 program dengan pagu anggaran tersaji pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pagu anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	Program	Pembiayaan (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19,756,203,173	
2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4,670,608,978	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2,639,718,500	
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	168,540,300	
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	680,659,900	
6	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2,176,296,065	
7	Pogram Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	365,201,100	
8	Program Pengembangan Ekspor	1,146,066,500	
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	280,429,650	
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	235,392,500	
	Jumlah Dinas	32,119,116,666	

Pada Tahun 2023 pagu anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar 32,119,116,666 yang dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

- **Bidang Fasilitas dan Informasi Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- **Bidang pembinaan dan Pengembangan Industri:**

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi.

- **Bidang Perdagangan Dalam Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.

Kegiatan- 2 : Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

Kegiatan- 3 : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya.

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Kegiatan- 3 : Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- **Bidang perdagangan Luar Negeri:**

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API).

Program Pengembangan Ekspor dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

- **UPT – Pengujian Sertifikasi Mutu Barang**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di

Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

- **UPT – Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah:**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi.

- **UPT – Pengawasan dan Perlindungan Konsumen**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas kegiatan :

- Kegiatan- 1 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 2 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan- 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kegiatan- 4 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- Kegiatan- 5 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Kegiatan- 6 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dengan kegiatan terdiri atas :

- Kegiatan- 1 : Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan- 2 : Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.4
Rumusan Rencana
Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN N)				Catat an Penti ng	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 (N+1)	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Sumbe r Dana		Targe t Capai an Kinerj a	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	-6.00	-7	-8	-5	-10
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				22,319,569,179.48				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				19,840,660,179.48				
	Prog. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawes i Tengah	66	16,548,334,529.48	APBD		66	18,203,167,982
	Keg. Perencanaan, Panganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai SAKIP Disperindag	Sulawesi Tengah	80	695,142,121.00	APBD		80	764,656,333
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	13,747,942,083.48	APBD		90	15,122,736,292
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sulawesi Tengah	14	257,626,030.00	APBD		14	283,388,633

Keg.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer/stokeholder)	Sulawesi Tengah	88.5	114,189,000.00	APBD		88.5	125,607,900
Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Sulawesi Tengah	1	499,612,481.00	APBD		1	549,573,729
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah						0
Keg.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Dokumen)	Sulawesi Tengah		139,106,494.00	APBD			153,017,143
		-	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1				1	0
Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Dokumen)	Sulawesi Tengah		670,002,020.00	APBD			737,002,222
		-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1				1	0
Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (Dokumen)	Sulawesi Tengah		424,714,300.00	APBD			467,185,730

		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan) -	Sulawesi Tengah	1				1	0
	Prog	PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase rekomendasi SIUP B2,/MB-Gol.B /MB Gol. C (%) -	Sulawesi Tengah	100	339,310,000.00	APBD		100	373,241,000
		Persentase penerbitan SKA (%) -	Sulawesi Tengah	100				100	0
	Keg.	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi -	Sulawesi Tengah	1	72,809,100.00	APBD		1	80,090,010

	Keg.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	-	Jumlah Annual Report Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	266,500,900.00	APBD		1	293,150,990
	Prog.	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	Persentase sarana prasarana distribusi perdagangan yang terfasilitasi (%)	Sulawesi Tengah	100	145,468,000.00	APBD		100	160,014,800
	Keg.	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	-	Jumlah Dokumen fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	145,468,000.00	APBD		1	160,014,800
	Prog.	STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	-	Persentase pemantauan harga barang kebutuhan pokok (%)	Sulawesi Tengah	100	1,860,713,600.00			100	2,046,784,960

	Keg.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	- Jumlah Dokumen Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	125,609,400.00	APBD	1	138,170,340
	Keg.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Jumlah dokumen laporan harga harian melalui Sistem Informasi Harga Kemendag (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,638,770,750.00	APBD	1	1,802,647,825
	Keg.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	- Persentase Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi (%)	Sulawesi Tengah	100	96,333,450.00	APBD	100	105,966,795

	Prog.	PENGEMBANGAN EKSPOR	-	Nilai ekspor (USD)	Sulawesi Tengah	23.641,6 E6	700,540,400.00	APBD		23.641,6E6	770,594,440
	Keg.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	Jumlah Annual Report Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	700,540,400.00	APBD		1	770,594,440
	Prog.	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	Persentase promosi dan Pemasaran Produk Dalam Negeri yang terfasilitasi (%)	Sulawesi Tengah	20%	246,293,650.00	APBD		20%	270,923,015
	Keg.	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	200,000,000.00	APBD		1	220,000,000
	Keg.	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	46,293,650.00	APBD		1	50,923,015
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						2,478,909,000.00	APBD			2,726,799,900

	Prog.	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	Sulawesi Tengah	100%	2,052,429,600.00	APBD		100%	2,257,672,560
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	2,052,429,600.00	APBD		1	2,257,672,560
	Prog.	PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	Persentase Izin Usaha Industri yang memiliki kesesuaian persyaratan teknis (%)	Sulawesi Tengah	100%	224,429,900.00	APBD		100%	246,872,890
	Keg.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	-	Jumlah laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	224,429,900.00	APBD		1	246,872,890
	Prog.	PENGELOLAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI	-	Persentase data Industri yang terdaftar dalam SIINas	Sulawesi Tengah	87%	202,049,500.00	APBD		87%	222,254,450

	NASIONAL	(%)							
	Keg. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Jumlah Dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	202,049,500.00	APBD		1	222,254,450
	UPT. PSMB				3,796,934,380.00				4,176,627,818
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,796,934,380.00				4,176,627,818
	Prog. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	66	3,477,870,571.00	APBD		66	3,825,657,628
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	329,760,000.00	APBD		90	362,736,000
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	174,070,590.00	APBD		1	191,477,649
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	2,660,219,285.00	APBD		1	2,926,241,214

	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	219,078,696.00	APBD	1	240,986,566
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	94,742,000.00	APBD	1	104,216,200
	Prog.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	Pertumbuhan Sertifikasi Mutu Produk / Komoditi (%)	Sulawesi Tengah	3	319,063,809.00	APBD	3	350,970,190
	Keg.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Sulawesi Tengah	77	319,063,809.00	APBD	77	350,970,190
			-	Indeks Kinerja PSMB (Indeks)	Sulawesi Tengah	4			4	0
	UPT. P2IPK						2,001,014,070.00			2,201,115,477
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						997,672,570.00			1,097,439,827
	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	66	997,672,570.00	APBD	66	1,097,439,827
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	617,520,000.00	APBD	90	679,272,000

	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	89,776,500.00	APBD	1	98,754,150
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	183,976,070.00	APBD	1	202,373,677
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	106,400,000.00	APBD	1	117,040,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,003,341,500.00			1,103,675,650
	Prog.	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	Sulawesi Tengah	100	1,003,341,500.00	APBD	100	1,103,675,650
	Keg.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	-	Jumlah dokumen Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (Dokumen)	Sulawesi Tengah	1	1,003,341,500.00	APBD	1	1,103,675,650
	UPT P2K		-				1,602,463,965.00			1,762,710,362

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					1,602,463,965.00				1,762,710,362
	Prog.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sulawesi Tengah	66	404,633,815.00	APBD		66	445,097,197
	Keg.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Persentase realisasi anggaran	Sulawesi Tengah	90	251,160,000.00	APBD		90	276,276,000
	Keg.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	69,000,000.00	APBD		1	75,900,000
	Keg.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	46,956,915.00	APBD		1	51,652,607
	Keg.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	37,516,900.00	APBD		1	41,268,590
	Prog.	STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	- Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	Sulawesi Tengah	90	1,197,830,150.00	APBD		90	1,317,613,165
	Keg.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	998,915,075.00	APBD		1	1,098,806,583

	Keg.	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan barang beredar yang diawasi sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan (Laporan)	Sulawesi Tengah	1	198,915,075.00	APBD	1	218,806,583
--	------	--	---	-----------------	---	----------------	------	---	-------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD TAHUN 2024

4.1 Telaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan tahun 2024 melalui insiatif dari Kabupaten/Kota, umumnya merupakan usulan para pemangku kepentingan dan wakil masyarakat dan instansi terkait lainnya yaitu guna memudahkan dan membantu pelaku usaha dalam peningkatan daya saing usaha dan peningkatan IKM serta perlindungan konsumen bagi masyarakat. Adapun usulan program/kegiatan kabupaten/kota Tahun 2023 tersaji pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Usulan Program/Kegiatan
Kabupaten / Kota Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Output Kegiatan	Volume	Lokasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Kabupaten Donggala				
1	Keg. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Sosialisai Pembinaan dan Pengembangan SNI Pasar Rakyat	1 Kegiatan	Kab.Donggala	
2	Keg. Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelatihan PengembanganProduk Pangan Kopi dan Cokelat	2 Kegiatan	Kab.Donggala	
2	Kabupaten Banggai Kepulauan				
1	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Ikan Asap	25 orang	Kec. Totikum, Kab Banggai Kepulauan	
2	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Pelatihan Teknis Produksi Minyak Kelapa Premium	25 IKM	Desa Lalong Kec.Tinangkung Utara, Kab.Banggai Kepulauan	
3	Kabupaten Buol				
1	Keg. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimtek Pendaftaran Sosialisasi TKDN/P3DN Bagi Industri Kecil	20 orang	Kecamatan Biau, Kab. Buol	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau pemangku kepentingan.

5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

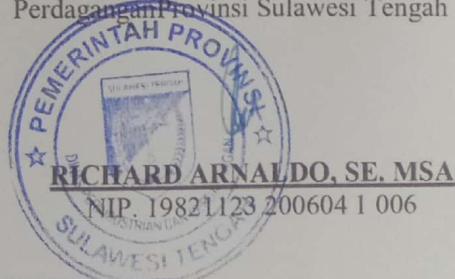
5.3 Rencana tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik.

Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

Palu,

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah



144

Renja 2024 Disperindag Provinsi Sulawesi Tengah